

RENJA PERUBAHAN 2023



BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar :

1. Rencana Pembangunan Daerah
2. Rencana Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu : RPJPD, RPJMD, RKPD, sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu : Renstra dan Renja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu dari sekian banyak perangkat daerah yang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yaitu renstra dan renja, dimana renja atau rencana kerja itu merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategis yang disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

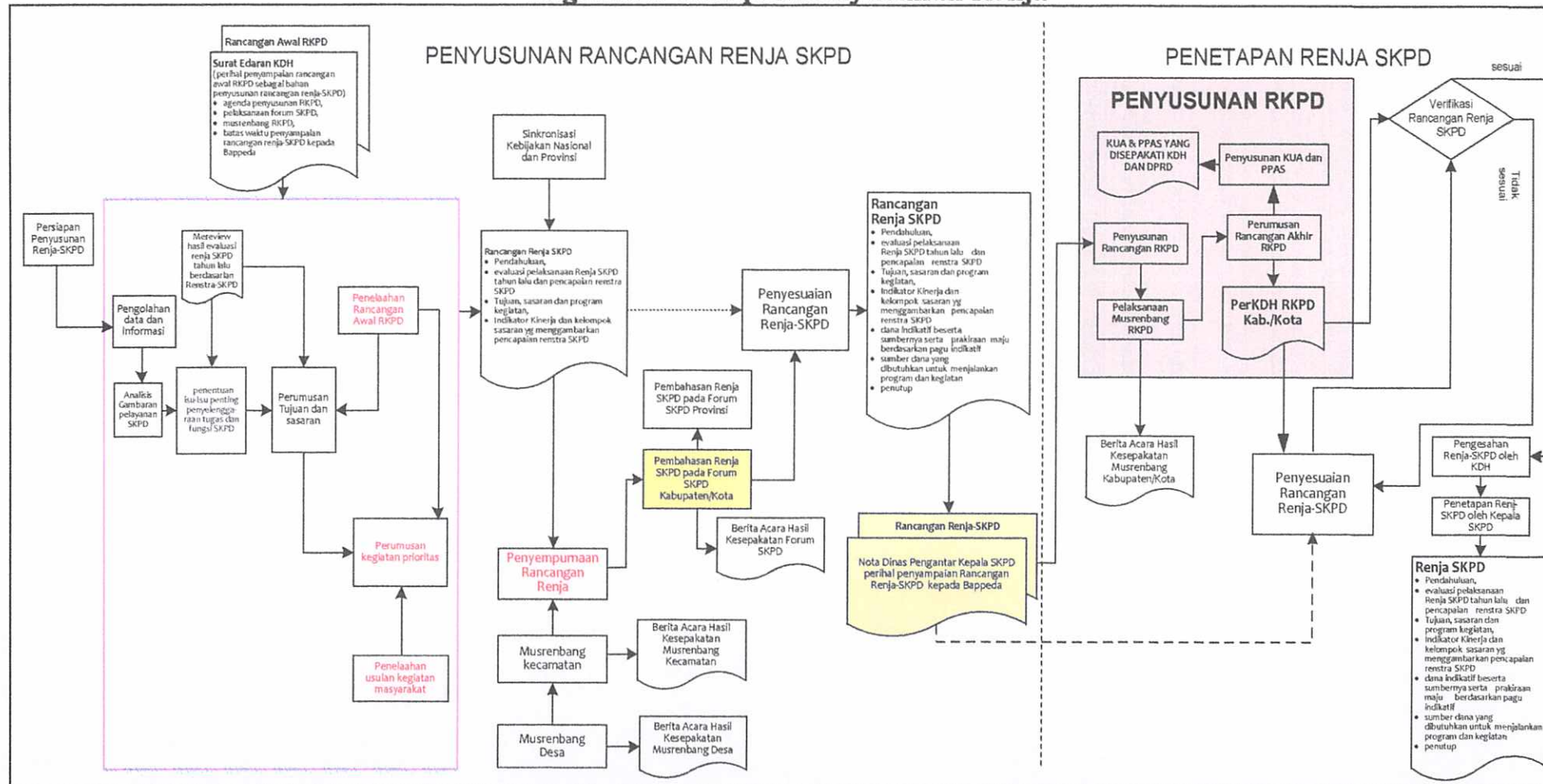
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Adapun dalam perjalanan pelaksanaan kinerja dalam Perangkat Daerah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan awal. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja yang disesuaikan dengan kebutuhan maka dibutuhkan perubahan rencana kerja dalam tahun bersangkutan.

Sejalan dengan Visi dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperbaiki kinerja pada tahun bersangkutan, maka dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam perbaikan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPKAD Kota Cimahi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan, program, indikator dan sasaran yang telah disusun dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Per 31 Juli 2023
Kota Cimahi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Capaian Kinerja Per Semester 1
1	2	3	4
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	100%	23%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran dan ASN yang mendapatkan pelayanan	100%	36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	42 Orang	36 orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100%	81%
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	44 Orang

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah yang diberikan	100%	54%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum yang diberikan	100%	51%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	2 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	1 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket
	1	2	3	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	6 dokumen
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	56%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	100%	59%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 kendaraan R2 dan 9 Kendaraan R4	12 kendaraan R2 dan 9 Kendaraan R4
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Aplikasi	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	30 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen Perda 1 dokumen Perwal Penjabaran APBD	1 dokumen Perda 1 dokumen Perwal Penjabaran APBD
	1	2	3	4
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen Perda 3 dokumen Perwal Penjabaran APBD	0 dokumen Perda 3 dokumen Perwal Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen (SE Pedum)	2 dokumen (SE Pedum)
		Jumlah laporan Fasilitasi kebijakan Regulasi Penganggaran		
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 dokumen	4 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 dokumen	4 dokumen
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	21%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 dokumen (RKUD)	18 dokumen (RKUD)
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240 dokumen (SPD)	120 dokumen (SPD)
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 dokumen	2 dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 laporan	6 laporan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 BA (Rekon Penerimaan dan Pengeluaran)	60 BA (Rekon Penerimaan dan Pengeluaran)
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	0 dokumen
1	2	3	4
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	100 orang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	56%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- 20 dokumen (dok pendukung lap bulanan, triwulan, semesteran) - 1 dokumen (rekon) - 1 data valid (validasi transaksi pendapatan dan belanja)	- 10 dokumen (dok pendukung lap bulanan, triwulan, semesteran) - 0 dokumen (rekon) - 0 data valid (validasi transaksi pendapatan dan belanja)
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- 1 laporan (analytical Review Lap Keuangan) - 2 laporan (lap.keu pemda)	- 1 laporan (analytical Review Lap Keuangan) - 1 laporan (lap.keu pemda)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- 1 dokumen Rancangan PP APBD TA 2023 - 1 dokumen Rancangan Penjabaran PP APBD TA 2023	- 1 dokumen Rancangan PP APBD TA 2023 - 1 dokumen Rancangan Penjabaran PP APBD TA 2023

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- 1 dokumen (Tinjut LHP BPK) - 1 kasus (kasus kerugian daerah yang terselesaikan pada th berjalan)	- 1 dokumen (Tinjut LHP BPK) - 1 kasus (kasus kerugian daerah yang terselesaikan pada th berjalan)
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen (modul kebijakan akuntansi/sistem akuntansi pemda)	1 dokumen (modul kebijakan akuntansi/sistem akuntansi pemda)
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen (SOP Penyusunan Laporan Keuangan)	1 dokumen (SOP Penyusunan Laporan Keuangan)
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 BLUD	15 BLUD
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan statistik Pemda	1 laporan statistik Pemda
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Belanja Bunga dan Belanja Tidak Terduga	100%	25.500.000.000
1	2	3	4
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Aplikasi SIPD	100%	42%
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	30 SKPD	30 SKPD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset	70%	70%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen (SSH)	1 Dokumen (SSH)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen (Raperwal kebijakan BMD)	0 Dokumen (Raperwal kebijakan BMD)

Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	15 Laporan	13 Laporan
	Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	0 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimaslisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	5 Dokumen	1 Dokumen
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang

Selain itu capaian kinerja dapat dilihat melalui realisasi keuangan dan fisik dari belanja BPKAD yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Kota Cimahi
Per 31 Juli Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan			Sisa Anggaran
		Realisasi	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.170.359.451	6.763.902.701	38%	37,76%	28.406.456.750
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	13.396.805.230	4.790.672.232	36%	35,76%	8.606.132.998
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	104.660.900	23.326.000	23%	22,29%	81.334.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.114.900	2.596.000	5%	4,63%	53.518.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.546.000	20.730.000	43%	42,70%	27.816.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.963.944.772	4.090.619.302	35%	34,19%	7.873.325.470

1	2	3	4	5	6
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.956.502.772	4.085.807.802	35%	34,17%	7.870.694.970
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.440.000	3.021.500	69%	68,05%	1.418.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.022.000	1.790.000	60%	59,63%	1.212.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.791.538	292.813.698	51%	50,50%	286.977.840
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.176.678	76.395.155	48%	47,99%	82.781.523
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.720.600	31.201.100	59%	58,08%	22.519.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.884.260	19.006.650	71%	70,70%	7.877.610
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.400.000	120.324.020	52%	51,33%	114.075.980
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.410.000	40.686.773	50%	49,37%	41.723.227
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.200.000	Rp5.200.000	23%	22,41%	18.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.070.000	255.000.000	56%	55,43%	205.070.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.070.000	255.000.000	56%	55,43%	205.070.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.515.600	Rp11.931.313	59%	58,16%	8.584.287
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	Rp2.203.313	41%	40,80%	3.196.687
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.115.600	Rp9.728.000	65%	64,36%	5.387.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.153.020	Rp86.765.140	41%	40,14%	129.387.880
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.153.020	Rp86.765.140	41%	40,14%	129.387.880
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	20.082.444.721	1.232.108.297	7%	6,14%	18.850.336.424

1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.234.834.071	542.229.189	44%	43,91%	18.832.600
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	83.402.915	63.557.400	77%	76,21%	188.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	72.650.888	6.000.000	9%	8,26%	66.650.888
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	233.594.426	29.620.900	13%	12,68%	203.973.526
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	265.529.644	106.498.600	41%	40,11%	159.031.044
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	20.476.600	18.346.600	90%	89,60%	2.130.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	21.259.040	0	0%	0%	21.259.040
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	94.708.143	15.995.900	17%	16,89%	78.712.243
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	91.407.430	19.191.100	22%	21%	72.216.330
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	140.265.239	109.234.400	78%	77,88%	31.030.839
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	72.874.639	60.206.389	83%	82,62%	12.668.250
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	69.176.171	58.167.500	85%	84,09%	11.008.571
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	69.488.936	55.410.400	80%	79,74%	14.078.536
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	354.567.600	72.208.300	21%	20,37%	282.359.300
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24.391.600	8.020.400	33%	32,88%	16.371.200

1	2	3	4	5	6
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.275.600	11.528.350	37%	36,86%	19.747.250
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35.818.800	9.884.900	28%	27,60%	9.884.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.014.900	5.348.050	15%	14,85%	30.666.850
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	33.219.500	0	0%	0%	33.219.500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	653.582.400	618.848.433	100%	95%	34.733.967
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31.828.200	27.615.100	87%	86,76%	4.213.100
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	458.285.550	232.116.722	51%	50,65%	226.168.828
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD Kabupaten/Kota	66.243.750	54.860.150	83%	82,82%	11.383.600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	32.615.300	10.596.000	33%	32,49%	22.019.300

1	2	3	4	5	6
Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	64.117.600	36.467.000	57%	56,88%	27.650.600
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	56.967.750	33.670.600	60%	59,10%	23.297.150
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.737.000	19.101.500	40%	39,19%	29.635.500
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	25.116.400	15.430.350	62%	61,44%	9.686.050
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	20.586.500	18.086.500	88%	87,86%	2.500.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah	17.500.552.500	92.533.017	100%	54%	17.408.019.483
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	500.000.000	92.533.017	50%	18,51%	407.466.983
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.000.552.500	0	0%	0%	17.000.552.500
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	187.992.500	Rp77.193.869	42%	41,06%	110.798.631
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	187.992.500	Rp77.193.869	42%	41,06%	110.798.631
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.691.109.500	741.122.172	43,82%	44%	949.987.328
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.691.109.500	741.122.172	43,82%	44%	949.987.328
Penyusunan Standar Harga	133.330.000	64.045.000	49%	50%	69.285.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	37.174.100	12.174.100	33%	32,75%	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	209.816.700	167.048.200	80%	79,62%	42.768.500
Inventarisasi Barang Milik Daerah	145.474.500	50.388.151	35%	34,64%	95.086.349
Pengamanan Barang Milik Daerah	710.948.500	252.240.450	36%	35,48%	458.708.050
Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000	50.108.371	34%	33,41%	99.891.629
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.096.100	13.966.500	58%	57,96%	10.129.600

1	2	3	4	5	6
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	146.643.000	63.305.000	44%	43,17%	83.338.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.000.000	11.250.000	75%	75%	3.750.000
Jumlah	35.170.359.451	6.763.902.701	20%	19,23%	28.406.456.750

Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2022 bermakna sangat berhasil karena pencapaiannya sebesar 113,97 %. Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BPKAD
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	60%	66,7 %	141,90 %
Rata - Rata Capaian						113,97 %

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD RI
 - b. Penganggaran Yang Efisien dan Efektif
 - c. Pengelolaan Keuangan dengan Peraturan dan Perundangan Terbaru
 - d. Pengamanan Terkait Aset-aset Pemerintah
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. Rekomendasi dan Catatan Strategis
 - a. Implementasi dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD
 - b. Penyusunan Penganggaran Sesuai Dengan Tujuan Organisasi
 - c. Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan
 - d. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Cimahi
 - e. Penyusunan Kebijakan Teknis Terkait Penatausahaan BMD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Tujuan Strategik tersebut yaitu Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BPKAD adalah meningkatkan Kinerja BPKAD melalui perubahan perencanaan yang telah disesuaikan target, indikator dan anggaran.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset.

3.2 Program dan Kegiatan

3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
KEUANGAN												43.169.806.951	37.292.751.338			49,438,371,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												13.396.805.230	15.344.348.717			19,496,733,900	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												104.660.900	104.660.900			39.672.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja BPKAD		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	56.114.900	56.114.900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	23.115.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja BPKAD		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	2 Laporan	2 Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	48.546.000	48.546.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	16.557.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												11.963.944.772	13.789.095.015			18,463,957,458	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Keuangan BPKAD		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	36 Orang/bula	n504 Orang/bu	a2n8 Dokumen	28 Dokumen	11.956.502.772	13.781.653.015	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	18.456.515.458

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Keuangan BPKAD		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	1 Laporan	1 Laporan	28 Dokumen	28 Dokumen	4.440.000	4.440.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	4.440.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana Semesteran	uang n/ an Laporan n ^o an ^o L ^u a m ^o p ^o r ^o n Keuanga n BPKAD /Semeste		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	12 Laporan	1 Laporan	28 Dokumen	28 Dokumen	3.002.000	3.002.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	3.002.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											42.394.400	45.844.400				1.714.500	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan BMD di BPKAD		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	4 Laporan	4 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	42.394.400	45.844.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	1.714.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											9.275.000	9.275.000				10.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	55 Orang	55 Orang	1 kegiatan	1 kegiatan	9.275.000	9.275.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah											579.791.538	590.912.782				598.195.900	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	159.176.678	162.692.922	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	159.184.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	53.720.600	58.070.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	53.722.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	26.884.260	26.919.260	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	27.069.800
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	234.400.000	234.400.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	233.362.900
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	82.410.000	85.630.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	85.707.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang diberikan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	23.200.000	23.200.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	39.150.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											460.070.000	569.001.000				146.178.042	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	8 Unit	100 Persen	8 unit	0	108.931.000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	2 Unit	2 Unit	100 Persen	8 unit	460.070.000	460.070.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	146.178.042
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											20.515.600	16.186.600				20.516.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Belanja Jasa Penunjang		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.400.000	5.400.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	5.400.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Belanja Jasa Penunjang		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	15.115.600	10.786.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	15.116.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											216.153.020	219.373.020				216.500.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas yang dipelihara		50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	11 Unit	11 Unit	12 Kendaraan	12 Kendaraan	216.153.020	219.373.020	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50 Nilai 80.75 Nilai A nilai	216.500.000
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											28.081.892.221	20.059.102.121				28.341,637,100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											1.234.834.071	1.205.208.071				1.291.637.100	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	83.402.915	76.702.915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	88.599.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	72.650.888	72.650.888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	76.963.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	30 Dokumen	30 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	233.594.426	219.181.426	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	232.660.200
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Aplikasi yang dipelihara Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	1 Aplikasi 30 Dokumen	1 Aplikasi 30 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	265.529.644	225.516.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	292.262.400

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	30 Dokumen	30 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	20.476.600	18.376.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	21.711.700
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	30 Dokumen	30 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	21.259.040	24.059.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	21.711.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	94.708.143	94.708.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100.128.600

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	91.407.430	91.407.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	99.192.200
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	140.265.239	135.115.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	142.609.500
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	72.874.639	82.252.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	76.176.400

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	69.176.171	58.976.171	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	70.076.400
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Anggaran Daerah		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	40 Orang	40 Orang	11 Dokumen	11 Dokumen	69.488.936	106.260.936	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0 Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen 100 persen	69.546.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											354.567.600	354.551.000				425.000.000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Perbenda haraan		100 Persen	100 Persen	36 Dokumen	36 Dokumen	355 Dokumen	355 Dokumen	24.391.600	24.391.600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	62.613.200
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Perbenda haraan		100 Persen	100 Persen	240 Dokumen	240 Dokumen	355 Dokumen	355 Dokumen	31.275.600	31.275.600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	36.727.800

Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Perbendaharaan		100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	355 Dokumen	355 Dokumen	35.818.800	35.818.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	41.331.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Re Penerimaan dan Pengeluaran Kas, D Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/ Pemot dan Penyetoran Perhitungan Pihak (PFK) dan Laporan Koordinasi dalam r Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	alisasi daerah, dan ongan Ketiga Hasil an jumlah Dokumen Perbendaharaan dan daerah, dan ongan Ketiga		100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	355 Dokumen	355 Dokumen	36.014.900	36.008.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	42.478.900
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Perbendaharaan		100 Persen	100 Persen	120 Dokumen	120 Dokumen	355 Dokumen	355 Dokumen	33.219.500	33.219.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	39.673.300

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa dan	Jumlah Dokumen Perbenda haraan n an		100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	355 Dokumen	355 Dokumen	64.468.300	64.460.300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	90.447.600
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perbenda haraan		100 Persen	100 Persen	200 Orang	200 Orang	355 Dokumen	355 Dokumen	129.378.900	129.376.800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	111.728.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											804.498.050	810.798.050				875.000.000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO,	Dokumen Akuntansi dan Pelapora n Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	20 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	31.828.200	31.828.200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	34.677.800
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Dokumen Akuntansi dan Pelapora n Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	3 Laporan	3 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	458.285.550	464.585.550	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	492.438.600

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	an nDokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	66.243.750	66.243.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	71.823.400
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	32.615.300	32.615.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	36.442.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	64.117.600	87.117.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	69.308.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	56.967.750	33.967.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	61.810.200
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Orang	30 Orang	30 Dokumen	30 Dokumen	48.737.000	51.237.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	53.268.000

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	15 Lembaga	15 Lembaga	30 Dokumen	30 Dokumen	25.116.400	25.116.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	28.747.200
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	20.586.500	18.086.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	26.484.800
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											25.500.000.000	17.500.552.500					25.500.000.000
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Dokumen Pengelolaan Keuangan (Adm Pembayaran Bunga dan BTT)		100 persen	100 persen	2 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000	500.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	500.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen Pengelolaan Keuangan (Adm Pembayaran Bunga dan BTT)		100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000.000	17.000.552.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	25.000.000.000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											187.992.500	187.992.500					250.000.000
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Terimplementasi SIPD di Seluruh SKPD	nya D	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 SKPD	30 SKPD	187.992.500	187.992.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi		Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	250.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											1.691.109.500	1.889.300.500					1.600.000.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah											1.691.109.500	1.889.300.500					1.600.000.000

Penyusunan Standar Harga	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	133.330.000	133.330.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	180.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	37.174.100	76.365.100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	45.000.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	20.426.600	20.426.600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	30.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	1 Laporan	4 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	209.816.700	229.816.700	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100.000.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	2 Laporan	3 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	145.474.500	165.474.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	150.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	15 Laporan	15 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	710.948.500	689.948.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	650.000.000

Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	3 Laporan	3 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	150.000.000	290.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	155.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	1 Laporan	4 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	24.096.100	24.096.100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	25.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, dan Pemusnahan, dan	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	146.643.000	146.643.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	150.000.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	4 Laporan	5 Laporan	35 Dokumen	35 Dokumen	15.000.000	15.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	15.000.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengelola an BMD		100 persen	100 persen	60 Orang	243 Orang	35 Dokumen	35 Dokumen	98.200.000	98.200.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100.000.000
TOTAL											43.169.806.951	37.292.751.338					49,438,371,000

BAB V

P E N U T U P

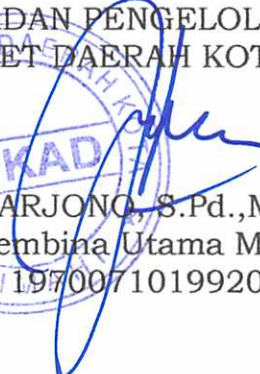
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini merupakan perbaikan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Cimahi, 3 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI


HARJONO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007101992011001